Islamic Business Insight (IBIS)
P–ISSN: 3109-8762 E-ISSN: 3109-8789
Vol. 2, No. 2, Desember 2026

Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Tepian Sungai Lematang

Dewi Sartika[1], Fifi Fitria[2], Harun Samsuddin[3,] Hasperi Susanto[4]
[1,2,3,4] Program Magister Manajemen Unsela
Email: dewisartikaa080392@gmail.com, harunsamsudin@yahoo.co.id, hasperifey@gmail.com

Abstract

This study analyzes the strategy of arranging street vendors (PKL) in the Lematang Riverside Tourism Area, Lahat Regency, with emphasis on strategy formulation, policy implementation, and its implications for tourism-area order and vendor business sustainability. The study used a qualitative descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving six purposively selected informants: one representative of the Lahat Regency Department of Industry and Trade, one Satpol PP officer, and four street vendors. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that the arrangement strategy was formulated through environmental analysis, stakeholder identification, strategic issue setting, implementation, and monitoring, but early participation of vendors remained predominantly top-down. Implementation emphasized socialization, persuasion, and gradual guidance, while being constrained by limited supporting facilities and supervisory personnel. Zoning improved spatial order, cleanliness, and visitor comfort, but initially reduced customer numbers and vendor turnover by about 30–40%. Business continuity was maintained through vendor adaptation, although long-term location certainty remains important.

Keywords: *Street Vendors, Strategic Management, Policy Implementation, Tourism Area, Business Sustainability*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Wisata Tepian Sungai Lematang Kabupaten Lahat dengan fokus pada perumusan strategi, implementasi kebijakan, serta implikasinya terhadap ketertiban kawasan wisata dan keberlangsungan usaha pedagang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas satu informan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat, satu informan Satpol PP, dan empat PKL. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penataan telah dirumuskan melalui analisis lingkungan, identifikasi stakeholder, penetapan isu strategis, implementasi, dan monitoring, tetapi partisipasi pedagang pada tahap awal masih cenderung top-down. Implementasi mengedepankan sosialisasi, pendekatan persuasif, dan pembinaan bertahap, namun terkendala keterbatasan fasilitas pendukung dan personel pengawas. Penataan zonasi memberikan dampak positif terhadap keteraturan tata ruang, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung, tetapi pada fase awal menyebabkan penurunan pelanggan dan omzet sekitar 30–40%. Keberlangsungan usaha tetap bertahan melalui adaptasi pedagang, sementara kepastian lokasi usaha jangka panjang menjadi kebutuhan penting.

Kata kunci*:* *Pedagang Kaki Lima, Manajemen Strategis, Implementasi Kebijakan, Kawasan Wisata, Keberlangsungan Usaha*

Pendahuluan

Kawasan wisata memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak hanya mendukung aktivitas pariwisata, tetapi juga membuka ruang usaha bagi masyarakat. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi bagian dari sektor informal yang menyediakan kebutuhan pengunjung sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat. Namun, keberadaan PKL yang tidak tertata dapat menimbulkan persoalan penggunaan ruang publik, akses pejalan kaki, kebersihan, kenyamanan, dan estetika kawasan.

Kondisi tersebut ditemukan di Kawasan Wisata Tepian Sungai Lematang Kabupaten Lahat. Berdasarkan observasi awal pada Maret 2026, terdapat 99 PKL yang melakukan aktivitas usaha. Sekitar 38 pedagang atau 38,4% masih memanfaatkan trotoar, jalur pejalan kaki, dan sebagian fasilitas umum sebagai lokasi berdagang. Wawancara pendahuluan terhadap 10 PKL juga menunjukkan bahwa delapan pedagang mengalami penurunan omzet setelah penataan, dari sekitar Rp700.000–Rp1.000.000 menjadi Rp450.000–Rp650.000 per hari, atau sekitar 30–40%. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan ketertiban kawasan dengan keberlangsungan ekonomi pedagang.

Penataan PKL karena itu tidak cukup dipahami sebagai tindakan penertiban, tetapi sebagai proses manajemen strategis sektor publik yang harus memperhatikan lingkungan organisasi, stakeholder, isu strategis, perumusan strategi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi (Bryson, 2018). Dalam pelaksanaannya, keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Meter and C. E. Van Horn, 1975)

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perumusan strategi penataan PKL, implementasi strategi dalam mewujudkan ketertiban kawasan wisata, implikasi strategi terhadap keberlangsungan usaha PKL, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi penataan di Kawasan Wisata Tepian Sungai Lematang Kabupaten Lahat.

Kajian Teori

Manajemen Strategis Sektor Publik. Penelitian menggunakan pemikiran John M.

Bryson sebagai landasan utama. Dalam tesis, proses manajemen strategis sektor publik dianalisis melalui enam tahapan: analisis lingkungan strategis, identifikasi stakeholder, penetapan isu strategis, perumusan strategi, implementasi strategi, serta monitoring dan evaluasi . Kerangka tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah menyusun dan mengelola strategi penataan PKL.

Implementasi Kebijakan. Teori Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis pelaksanaan strategi. Enam variabel yang diperhatikan adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik .

Penataan PKL dan Keberlangsungan Usaha. Penataan PKL dalam penelitian mencakup pendataan pedagang, penetapan lokasi usaha, pembinaan dan pemberdayaan, penyediaan sarana-prasarana, pengawasan dan penegakan aturan, serta upaya menjaga keberlanjutan usaha. Keberlangsungan usaha dianalisis melalui stabilitas pendapatan, keberlanjutan aktivitas usaha, jumlah dan loyalitas pelanggan, kemampuan beradaptasi, peluang pengembangan usaha, dan kepastian lokasi usaha. Pendekatan ini menempatkan ketertiban kawasan dan keberlangsungan ekonomi sebagai dua tujuan yang perlu diseimbangkan.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi penataan PKL. Lokasi penelitian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat dengan objek kajian Kawasan Wisata Tepian Sungai Lematang.

Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kapasitas, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam subjek penelitian. Total informan berjumlah enam orang, terdiri atas satu informan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat, satu informan dari Satpol PP Kabupaten Lahat, dan empat PKL.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan dokumen pendukung. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dokumentasi, buku catatan

lapangan, kamera/telepon seluler, alat perekam suara, laptop/komputer, dan alat tulis. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi .

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat merumuskan strategi penataan melalui pendataan, sosialisasi, penataan lokasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban. Pertimbangan internal meliputi kemampuan organisasi, personel, sarana-prasarana, dan koordinasi antarinstansi. Pertimbangan eksternal mencakup kondisi PKL, perkembangan kawasan wisata, kebutuhan pengunjung, kondisi sosial masyarakat, serta tuntutan ketertiban dan kebersihan.

Jika dibandingkan dengan tahapan Bryson, proses tersebut telah mencakup analisis lingkungan strategis, identifikasi stakeholder, penetapan isu strategis, perumusan dan implementasi strategi, serta monitoring. Namun, kelemahan ditemukan pada tahap awal karena keterlibatan pedagang dalam dialog dan pemetaan kondisi sosial-ekonomi belum optimal. Temuan ini menguatkan penelitian Nugraha, Santoso, dan Setiawan yang menekankan pentingnya partisipasi pedagang dalam penataan kawasan wisata.

Dengan demikian, strategi penataan telah bergerak secara sistematis, tetapi masih perlu diperkuat melalui forum partisipatif sebelum penetapan atau perubahan zonasi. Partisipasi yang lebih awal penting agar pemerintah memperoleh informasi lapangan mengenai pola pelanggan, aksesibilitas, dan kondisi usaha pedagang. Implementasi strategi dilakukan melalui koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP. Pendekatan yang digunakan mengutamakan pemantauan lapangan, imbauan, sosialisasi, pembinaan, dan tindakan penertiban apabila terjadi pelanggaran. Informan pedagang juga menggambarkan bahwa petugas memberikan arahan dan peringatan sebelum tindakan yang lebih tegas dilakukan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dan komunikasi antarorganisasi menjadi unsur penting. Pendekatan persuasif dan pembinaan membantu mengurangi potensi konflik serta meningkatkan pemahaman pedagang

terhadap tujuan penataan. Hasil ini sejalan dengan penelitian tentang implementasi kebijakan penataan PKL yang menempatkan komunikasi dan sikap pelaksana sebagai faktor penting dalam penerimaan kebijakan.

Hambatan utama berada pada keterbatasan sumber daya berupa fasilitas pendukung tempat berdagang yang memadai dan keterbatasan personel pengawas. Kondisi tersebut menyebabkan konsistensi kepatuhan pedagang membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Dari perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), keterbatasan sumber daya dapat mengurangi efektivitas implementasi meskipun tujuan kebijakan telah jelas. Penataan zonasi memberikan dampak positif terhadap keteraturan tata ruang, kebersihan kawasan, dan kenyamanan pengunjung. Penertiban penggunaan trotoar dan badan jalan membantu mengembalikan fungsi ruang publik dan meningkatkan kerapian kawasan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aotama dan Klavert (2021) serta Budiman dan Suryadi (2023) yang menunjukkan bahwa penataan atau relokasi dapat memperbaiki aspek keteraturan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan.

Namun, ketertiban tidak hanya ditentukan oleh tindakan penertiban pada saat tertentu. Konsistensi pengawasan, ketersediaan fasilitas, komunikasi, dan kepatuhan pedagang perlu dijaga agar kondisi tertib dapat dipertahankan. Karena itu, monitoring dan evaluasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari siklus strategi, bukan hanya kegiatan setelah penertiban. Dampak ekonomi penataan menunjukkan adanya tekanan pada fase awal. Perubahan lokasi dan aksesibilitas konsumen menyebabkan sebagian pedagang mengalami penurunan jumlah pelanggan dan omzet sekitar 30–40%. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan lokasi pascapenataan dapat menurunkan pendapatan pada fase awal (Fauzi, et.al, 2022).

Meskipun demikian, aktivitas usaha tetap berjalan karena pedagang melakukan berbagai bentuk adaptasi, termasuk menyesuaikan posisi usaha dan menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai lokasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas adaptasi pedagang.

Peluang pengembangan usaha pascapenataan masih belum optimal. Pedagang cenderung memprioritaskan mempertahankan usaha daripada memperluas skala usaha.

Dalam kondisi tersebut, kepastian lokasi usaha menjadi faktor penting. Lokasi yang jelas, aman, mudah diakses, dan memiliki potensi pelanggan memberikan dasar bagi pedagang untuk membangun pelanggan tetap dan merencanakan pengembangan usaha.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penataan tidak cukup diukur dari meningkatnya ketertiban kawasan. Keberhasilan perlu dinilai secara seimbang melalui kemampuan PKL mempertahankan usaha, memperoleh pelanggan, menjaga pendapatan, beradaptasi, mengembangkan usaha, dan memperoleh kepastian lokasi. Dengan demikian, strategi penataan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik menjadi kebutuhan bagi pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan. Model temuan penelitian memperlihatkan hubungan antara proses perumusan strategi, implementasi, ketertiban kawasan, dan keberlangsungan usaha. Perumusan strategi yang lebih partisipatif diharapkan memperkuat penerimaan pedagang. Implementasi yang didukung sarana-prasarana, komunikasi persuasif, dan pengawasan berkelanjutan memperkuat kepatuhan zonasi. Selanjutnya, kepastian lokasi dan aksesibilitas konsumen menjadi unsur penting untuk menjaga stabilitas pendapatan dan keberlangsungan usaha. Model tersebut menegaskan bahwa tujuan penataan harus mengintegrasikan ketertiban kawasan wisata dengan keberlanjutan ekonomi PKL.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan. Pertama, strategi penataan PKL di Kawasan Wisata Tepian Sungai Lematang telah dilakukan melalui analisis lingkungan, identifikasi stakeholder, penetapan isu strategis, perumusan, implementasi, dan monitoring. Namun, partisipasi dialogis pedagang pada tahap awal masih belum optimal. Kedua, implementasi penataan dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, sosialisasi, dan pembinaan bertahap, tetapi terkendala keterbatasan fasilitas pendukung dan personel pengawas. Ketiga, penataan zonasi memberikan dampak positif terhadap keteraturan tata ruang, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung, tetapi pada fase awal menimbulkan penurunan pelanggan dan omzet sekitar 30–40% pada sebagian pedagang. Keempat, keberlangsungan usaha tetap bertahan melalui adaptasi pedagang, sedangkan kepastian lokasi dan aksesibilitas konsumen menjadi faktor penting.

Saran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat perlu memperkuat

forum komunikasi berkala dengan paguyuban PKL, menyediakan fasilitas pendukung kawasan, serta mengembangkan pendampingan usaha dan promosi digital. Satpol PP perlu mempertahankan pendekatan humanis dan persuasif serta memperkuat pengawasan rutin pada jam padat pengunjung. PKL perlu meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan dan memperkuat wadah paguyuban sebagai sarana komunikasi dengan pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk mengukur dampak penataan terhadap pendapatan pedagang dan kepuasan wisatawan.

Daftar Pustaka

Aotama, F., & Klavert, M. (2021). Dampak sosial relokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata kuliner Kota Tomohon. Jurnal Sosio-Ekonomi Publik, 8(1), 45–58.

Aprilliyani, D. (2024). Keberlangsungan usaha pedagang kaki lima pasca penataan kawasan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Informal, 6(1), 88–101.

Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (5th ed.). John Wiley & Sons.

Budiman, A., & Suryadi, E. (2023). Pengaruh penataan PKL terhadap ketertiban ruang publik. Jurnal Tata Kota dan Perencanaan Daerah, 15(3), 201–214.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Fauzi, M., Rahayu, S., & Hidayat, N. (2022). Dampak penataan ruang terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Jurnal Ekonomi Sektor Informal, 9(2), 112–126.

Lestari, P., & Wijaya, H. (2022). Implementasi kebijakan penataan PKL perspektif Van Meter dan Van Horn. Jurnal Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, 10(3), 178–192.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nugraha, F., Santoso, B., & Setiawan, Y. (2023). Partisipasi pedagang dalam penataan kawasan wisata. Jurnal Sosiologi Perkotaan dan Pembangunan, 7(2), 99–113.

Ramadhan, I., & Aulia, N. (2024). Integrasi manajemen strategi dalam penataan sektor informal kawasan wisata. Jurnal Manajemen Strategis Publik, 11(3), 189–203.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.